

**PERAN KETUA KPU KOTA PALEMBANG DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI
KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Muhammad Farhan Putera Yanuar

NPP. 30.0355

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: @gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The background of this research is that the political participation of the people in Indonesia has not been maximized, especially in the Palembang City Region. Community political participation is very important because community involvement in political activities is a way that can influence government decisions. In this case, participation becomes very important in order to create strong legitimacy. One of the institutions that plays a role in increasing people's political participation is the General Election Commission, this is stated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections.* **Purpose:** *This research is intended to obtain a description of the role of the Palembang City Election Commission Chairperson in order to increase people's political participation, then find out what are the inhibiting factors and the efforts made to overcome these inhibiting factors.* **Method:** *This research uses a descriptive research type with a qualitative approach which is located in Palembang City, while the site is at the General Election Commission of Palembang City. In conducting this research the authors used primary data sources obtained from several interviews conducted with related informants, and secondary data sources obtained from documents related to the research topic. Data collection techniques obtained through interviews, observation and documentation. While the research instruments are the researchers themselves, and several supporting tools such as interview guides, and other tools.* **Result:** *The results of this study indicate that the role played by the Palembang City KPU in increasing the political participation of the people in the Palembang City Region is carried out through socialization and political education activities. In carrying out political outreach activities, KPU Palembang City pays attention to the objectives, materials, and methods used. Meanwhile, in conducting political education, it is carried out by paying attention to the goals, methods, and cooperation of political education that is carried out.* **Conclusion:** *In this study, the authors suggest that the KPU of Palembang City must have indicators of success and a special team in conducting political socialization and education activities. In addition, KPU Palembang City can add more employees to the Technical and Public Relations Sub-Sections, because socialization and political education are their areas of work. After carrying out socialization and political education, KPU Palembang City must evaluate the implementation of these activities.*

Apparatus (ASN); Political Participation, Political Socialization, and Political Education.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum maksimalnya partisipasi politik masyarakat di Indonesia, khususnya di Wilayah Kota Palembang. Partisipasi politik masyarakat menjadi sangat penting karena keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik merupakan cara yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah. Dalam hal ini, partisipasi menjadi sangat penting guna mewujudkan legitimasi yang kuat. Salah satu lembaga yang berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah Komisi Pemilihan Umum, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. **Tujuan:** penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan deskripsi mengenai peran Ketua KPU Kota Palembang dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, kemudian mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Palembang, sedangkan situsnya berada di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari beberapa wawancara yang dilakukan dengan informan yang berkaitan, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Wilayah Kota Palembang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi politik, KPU Kota Palembang memperhatikan sasaran, materi, dan metode yang digunakan. Sedangkan dalam melakukan pendidikan politik dilakukan dengan memperhatikan sasaran, metode, dan kerjasama pendidikan politik yang dilakukan. **Kesimpulan:** Dalam penelitian ini, penulis menyarankan bahwa KPU Kota Palembang harus memiliki indikator keberhasilan dan tim khusus dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik. Selain itu, KPU Kota Palembang dapat menambah pegawai pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas, karena sosialisasi dan pendidikan politik merupakan bidang kerjanya. Setelah melakukan sosialisasi dan pendidikan politik, KPU Kota Palembang harus melakukan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Sosialisasi Politik, dan Pendidikan Politik.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara pemilu menjelaskan bahwa pemilu adalah sarana menjalankan kedaulatan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu merupakan salahsatu instrumen yang digunakan oleh bangsaIndonesia dalam mewujudkan pilar- pilar demokrasi dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Sebagai instrumen tentu saja ada beberapa menyesuaikan isi alat dengan dinamika kehidupan sosial dan politik apa yang terjadi di masyarakat.

Menurut Miriam Budiardjo (2008:367), “partisipasi politik adalahsuatu kegiatan” seseorang atau sekelompok orang untuk berperan serta secara aktif dalam kehidupan politik, juga melalui pemilihan kepalanegara secara langsung atau tidak langsung dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah”. Partisipasi politik menjadi sangat penting karena partisipasi masyarakat dalam politik

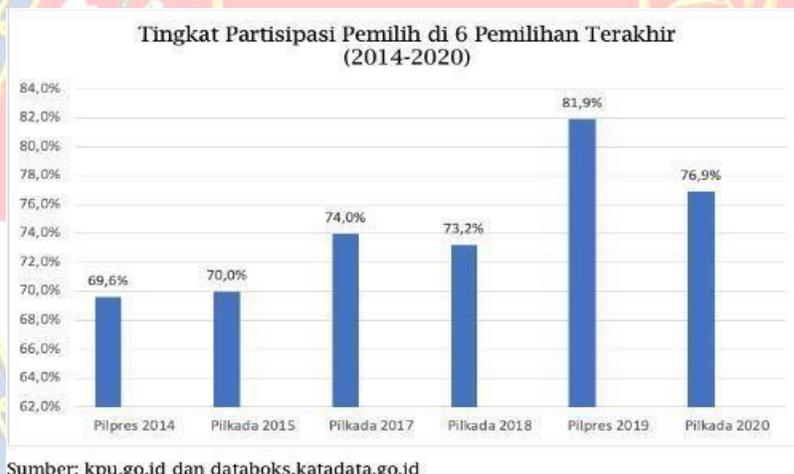
merupakan salah satu peluang untuk memengaruhi keputusan kebijakan dan memantau pemerintah di negara yang menganut sistem demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Artinya, semakin tinggi partisipasi politik kotamadya menunjukkan bahwa Kota madya memantau, memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.

Dalam 6 pemilihan terakhir (pemilihan Presiden dan Wakil Presidenserta pemilihan kepala daerah), terdapat kenaikan tingkat partisipasi pemilih. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 menghasilkan partisipasi pemilih yang paling tinggi sebesar 81,9 persen, meningkat dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sebesar 69,6 persen. Begitu pula dalam pemilihan kepala daerah, di mana partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 sebesar 76,9 persen, meningkat dari pemilihan kepala daerah tahun 2015 (70 persen), 2017(74persen), dan 2018 (73,2 persen).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan peran ketua KPU Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Berikut gambar terkait tingkat partisipasi pemilih di 6 pemilihan terakhir 2014- 2020, sebagai berikut:

Gambar 1.1
Tingkat Partisipasi Pemilih di 6 Pemilihan Terakhir



Berdasarkan penjelasan di atas, masalah kurangnya partisipasi politik di Indonesia pada umumnya dan khususnya pada Kota Palembang. Inilah fenomena yang layak untuk dibahas dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Ditambah lagi dengan minimnya jumlah anggota Sub Bagian Teknis dan Hupmas yang bertanggung jawab atas sosialisasi dan pendidikan politik menimbulkan masalah tersendiri dalam peran Ketua KPU Kota Palembang untuk meningkatkan partisipasi politik lokal. Selain itu setiap kali diadakan pemilihan umum, masih banyak masyarakat yang masuk dalam kategori pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak menggunakan hak pilihnya atau masyarakat biasa disebut golput (golongan putih).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Willy Tri Hardianto ,Dkk (2022) yang berjudul “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat”, menjelaskan bahwa KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat berjalan dengan maksimal karena KPU Kota Batu mempunyai banyak inovasi untuk menyukseskan Pemilu Serentak.

Penelitian dari Winda Sari, Dkk (2019) yang berjudul "Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi", menjelaskan bahwa KPU Kota Palembang telah melakukan tugas dan wewenang mereka secara maksimal hanya saja dalam partisipasi pemilu untuk tuna netra fasilitas nya kurang memadai dari pemerintah sehingga pemerintah harus lebih memperhatikan setiap gol yang ikut serta dalam pemilihan umum lainnya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, pada penelitian yang dilakukan oleh Willy Tri Hardianto, Dkk yang berjudul "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat" menggunakan teori analisis dalam melakukan penelitian, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan teori peran dalam membahas terkait peran ketua KPU Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Winda Sari, dkk yang berjudul "Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi", perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu tujuan dan informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui peran Ketua KPU Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Palembang bukan hanya disaat pelaksanaan pemilu/pilkada saja, tetapi dari semua bentuk partisipasi politik masyarakat diantaranya ialah memberikan pendapat kepada pemerintah daerah atau pemerintah kota, dengan mengikuti sosialisasi KPU tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan peran ketua KPU Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, faktor penghambat serta upaya untuk mengatasinya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menjelaskannya ke dalam analisis dan perumusan masalah yang ditemukan saat di lapangan nantinya. Metode Kualitatif menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2006:4) mendefinisikan bahwa "penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristiwanya. Berdasarkan studi kasus diatas peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. langkah ini merupakan penelitian yang melalui beberapa tahapan untuk menjelaskan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subject dan tahapan yang diteliti..

Selain menggunakan metode kualitatif dalam menjelaskan data yang diperoleh, peneliti juga menggunakan metode deskriptif. Menurut Nazir (1983), metode deskriptif adalah metode untuk melihat status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, suatu sistem pemikiran atau suatu golongan peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan, secara sistematis, realistik dan akurat menggambarkan fakta, ciri-ciri dan hubungan antar fenomena yang diteliti.

Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang peran ketua KPU Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya mengatasinya. Teknik

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori Peran menurut Sarwono (2015) yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu: formulasi dan sasaran jangka panjang; pemilihan tindakan; dan alokasi sumber daya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Ketua KPU Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Di Masyarakat

Dalam mengukur peran ketua KPU Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi politik di masyarakat penulis menggunakan dimensi dan indikator peran yang peneliti ambil dari pendapat dari Sarwono (2015) sebagai berikut:

3.1.1 Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Dalam formulasi dan sasaran jangka panjang ketua KPU melaksanakan program yang sudah dijalankan dari tahun ke tahun seperti pendidikan pemilih dan partisipasi dilaksanakan secara berkala setiap tahun nya, perekrutan PPS, PPK, dan Relawan Demokrasi. RPP juga merupakan program jangka panjang yang dilakukan KPU sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat dari setiap kalangan dan kaum marjinal. RPP KPU Kota Palembang juga telah mengundang dan mengajak berbagai lapisan masyarakat dan pelajar untuk memberikan pemahaman dari sejarah, tugas dan pentingnya partisipasi masyarakat untuk kelangsungan demokrasi di Indonesia kedepannya khususnya Kota Palembang.

3.1.2 Pemilihan Tindakan

Dalam pemilihan tindakan Ketua KPU Kota Palembang melakukan program perekrutan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk pemilu 2024 dan ada juga program perekrutan Relawan Demokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dan juga mengajak masyarakat peduli dan tidak pasif jika ada kegiatan atau sosialisasi tentang edukasi politik. Perekrutan relawan demokrasi juga banyak dari kalangan remaja yang dilakukan oleh KPU dan akan menjadi bagian KPU untuk turun ke lapangan dan membimbing masyarakat dan menganalisis lingkungan masyarakat tersebut agar KPU Kota Palembang mengetahui apa yang akan disusun dan direncanakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap KPU Kota Palembang.

Program lain yang dijalankan KPU Kota Palembang juga adalah RPP (Rumah Pintar Pemilu) dimana dalam program tersebut diharapkan dari RPP dapat mengedukasi masyarakat mengenai apa saja yang dilakukan KPU kota Palembang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. RPP juga termasuk dalam penelitian peneliti dan melihat RPP KPU Kota Palembang karena peneliti sudah melihat tempat nya langsung tempat masih tertata rapih dan fasilitasnya masih memadai.

3.1.3 Alokasi Sumber Daya

KPU Kota Palembang dalam melaksanakan alokasi sumber daya KPU Kota Palembang merancang dan menganalisis masyarakat bagaimana masyarakat di Kecamatan Pandan, apa saja budaya yang biasa dilakukan masyarakat, mencari tahu pekerjaan mayoritas masyarakat yang ada di Kota Palembang sehingga KPU Kota Palembang tahu apa saja yang harus dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut.

Tabel 3.1
Sumber Daya KPU Kota Palembang

No	Nama Divisi
1.	Jajaran Komisioner
2.	Jajaran Sekretariat
3.	Jajaran PPID
4.	Tim Penghubung
5.	Desk Pelayanan
6.	Relawan Demokrasi

(Sumber: Dikelola oleh peneliti)

Dari berbagai tim dan divisi yang ada maka dari bentuk kekuatan KPU memiliki SDM yang memadai sehingga menandakan bahwa KPU Kota Palembang ini memiliki kekuatan yang besar dan tim yang kuat sehingga dapat memuat kinerja yang penulis rasa cukup memenuhi tujuan dari KPU Kota Palembang.

3.2 Hambatan Ketua KPU Kota Palembang dalam MeningkatkanPartisipasi Politik Masyarakat

Ketua KPU Kota Palembang dalam memenuhi targetnya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Palembang tentunya memiliki hambatan yaitu sebuah ancaman yang berasal dari luar dan harus di indentifikasi. dalam mengidentifikasi ancaman tersebut KPU Kota Palembang dapat menyusun sebuah strategi dimana strategi tersebut dapat mengendalikan. Hambatan yang terjadi pada KPU Kota Palembang dalammeningkatkan partisipasi masyarakat Kota Palembang diantaranya ialah:

3.2.1 Akses Tidak Memadai

Kota Palembang memiliki luas wilayah sebesar 400,61 km² / 40,061 ha yang terdiri dari 16 kecamatan dan 107 kelurahan. hal ini menandakan bahwa banyaknya masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang masih sulit di jangkau dan di hampiri dari kecamatan sehingga KPU Kota Palembang membutuhkan relawan yang dapat menjangkau akses tersebut, Dalam pemanfaatan relawan tersebut KPU Kota Palembang juga membutuhkan anggaran agar dapat memfasilitasi relawan demokrasi tersebut dalam mengakomodasi kendaraan untuk sampai ketujuan lokasi.

3.2.2 Rendahnya Pengetahuan Politik Masyarakat

Faktor kedua yang menjadi hambatan kinerja aparatur sipil negara dalam penerapan SPBE di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat adalah SPBE ini belum dapat terimplementasi secara menyeluruh kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat. Hal ini terjadi karena masih banyak sumber daya aparatur yang gagap teknologi dan tidak ingin memperbaharui kemampuan dalam dirinya. Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya hak masyarakat dalam melaksanakan pemilihan sangat rendah terlebih lagi jika masyarakat tersebut memiliki kekurangan dalam kesejahteraan beberapa masyarakat masih ada yang tidak menyekolahkan anaknya sehingga tidak terlalu memperdulikan sistem demokrasi di kecamatan tersebut. hal ini suatu hambatan terbesar dalam kinerja KPU Kota Palembang agar dapat mengedukasi masyarakat tersebut melalui sosialisasi yang di adakan masyarakat secara langsung kepada masyarakat

3.2.3 Informasi Media Sosial Kurang Tersampaikan KeMasyarakat Luas

Media sosial yang dikelola oleh KPU Kota Palembang masih minim di akses oleh masyarakat, mengingat pengguna terbesar media sosial ialah remaja masa kini sehingga banyak informasi tidak tersampaikan kepada kaum dewasa, disabilitas dan kaum lansia sehingga KPU Kota Palembang masih melakukansosialisasi dalam penyebaran informasi dengan manual.

3.2.4 Partisipasi Masyarakat Kota Palembang Yang Masih Belum Stabil

Partisipasi Masyarakat di Kota Palembang masih tergolong rendah hal ini dibuktikan bahwa perbandingan daftar partisipasi pilkada tahun 2018 dan pileg tahun 2019. Dalam pemilihan tersebut peneliti membandingkan pada tahun 2018 ialah pemilihan kepala daerah dan pada tahun 2019 ialah data pemilihan legislatif dimana data yang ada penurunan dapat di lihat dari partisipasi masyarakat di kota Palembang masih rendah dan masih memerlukan cara khusus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kota Palembang tersebut.

3.3 Upaya Ketua KPU Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Dalam peningkatan partisipasi masyarakat KPU Kota Palembang mengupayakan berbagai program dan pelaksanaan perencanaan agar masyarakat sadar akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi hal ini di lakukan dalam bentuk bekerjasama antar lembaga pemerintahan dan instansi pendidikan, diantaranya ialah: Dalam melakukan peningkatan tingkat partisipasi masyarakat antara pihak KPU dan Pihak Kecamatan itu berbeda beda hanya saja adanya koordinasi sebelumnya seperti mengkonfirmasi topik penyampaian dan apa yang kurang mengenai sistem demokrasi yang dibutuhkan oleh KPU akan di sampaikan ke kecamatan sehingga dapat langsung menyampaikan kemasyarakat. jika adanya koordinasi yang akan melibatkan pihak yang langsung kemasyarakat maka KPU itu sendiri yang langsung terjun ke lapangan dengan berkoordinasi dengan pihak Kelurahan. Dalam Upaya yang dilakukan KPU Kota Palembang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kecamatan Pandan maka KPU Kota Palembang melakukan beberapa kegiatan diantaranya ialah:

3.3.1 Rumah Pintar Pemilu (RPP)

RPP (Rumah Pintar Pemilu) merupakan sebuah fasilitas atau wadah yang dibuat oleh KPU Kota Palembang agar dapat diakses oleh masyarakat yang difungsikan sebagai pusat pengetahuan tentang pemilihan umum. Rumah Pintar Pemilu dapat di akses oleh seluruh kalangan dan juga terbuka untuk ormas atau organisasi masyarakat yang ingin belajar mengenai pendidikan pemilihan umum, biasanya KPU Kota Palembang juga mengundang para pelajar agar dapat memiliki pengetahuan dasar mengenai pemilu. Di Rumah Pintar Pemilu terdapat banyak buku yang menjelaskan tatacara pemilihan di TPS, sejarah KPU, dll. Dalam hal ini Rumah Pintar Pemilu dapat dijadikan oleh KPU Kota Palembang sebagai rencana jangka panjang untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Palembang KPU Kota Palembang juga mengundang SD agar dapat memberikan pendidikan dasar mengenai pemilihan umum dan memberikan contoh kecil agar mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar, contoh yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang kepada siswa sekolah dasar yaitu seperti pemilihan/voting ketua kelas, sekretaris, dan bendahara kelas.

3.3.2 Sosialisasi ke Sekolah dan Masyarakat

Proses yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu melakukan sosialisasi hal ini dilakukan untuk menarik perhatian dan memberitahukan masyarakat mengenai tugas dan tanggung jawab KPU Kota Palembang serta hak dan kewajiban masyarakat sebagai partisipan demokrasi. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang yaitu dengan mendatangi sekolah sekolah yang berada di Kota Palembang hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipan dari pemilih pemula dan mengedukasi bagaimana proses pemilihan umum berlangsung. Bukan hanya mendatangi sekolah mereka juga mengundang sekolah tersebut untuk mendatangi rumah pintar pemilu agar langsung melakukan praktek terhadap teori yang mereka paparkan saat sosialisasi di sekolah- sekolah tersebut.

3.3.3 Memaksimalkan Media Sosial dalam Menyebarkan Informasi dan Edukasi

Dalam hal ini KPU Kota Palembang memanfaatkan hal tersebut dengan cara memanfaatkan media sosial dengan mengelola media sosial tersebut untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat dengan cara mengunggah dan mengunduh hal yang menarik tentang KPU kota Palembang. Hal ini sangat menguntungkan KPU kota Palembang karena dapat diakses dengan mudah dan tidak memerlukan biaya dan anggaran yang berlebih kemudian masyarakat dapat mengakses dengan smartpone dari mana saja dan kapan saja.

3.3.4 Peningkatan SDM Dalam Perpanjang Tangan Oleh KPU Kota Palembang Ke Daerah Terpencil atau jarang dijangkau

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas KPU kota Palembang membutuhkan kekuatan dari masyarakat sebagai relawan, untuk membuat kekuatan di masyarakat agar masyarakat tersebut ikut dalam memberikan suaranya dalam pemilihan umum dan aktif berpartisipasi politik untuk memajukan semangat demokrasi masyarakat. Relawan demokrasi adalah putra putri daerah yang berpartisipasi dalam memberikan tenaganya untuk membantu KPU kota Palembang dalam menyebarkan informasi, edukasi, dan sosialisasi ke masyarakat yang sulit dijangkau dimana hal yang membuat rendahnya partisipasi politik masyarakat di KPU kota Palembang adalah jauhnya jarak TPS dari daerah yang ditinggali masyarakat yang tinggalnya cukup jauh dari tps, maka dari itu dibutuhkan kekuatan dari KPU kota Palembang untuk membentuk relawan demokrasi yang siap dan bertanggung jawab dalam mengedukasi masyarakat di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

3.3.5 Penyebaran Kesadaran Masyarakat Guna Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Palembang

Dalam meningkatkan partisipasi politik di Kota Palembang maka KPU Kota Palembang harus menyusun rencana untuk meningkatkan partisipasi politik tersebut. maka dari itu KPU Kota Palembang mengadakan sosialisasi ke Sekolah dan Universitas yang ada di kota Palembang sebagai bentuk KPU Kota Palembang untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilihan dan kemajuan kualitas demokrasi untuk negara sehingga KPU Kota Palembang berharap bahwa dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat dapat paham dan mengerti dan menggunakan hak pilih sebagai bentuk kesadaran masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam berpolitik.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran ketua KPU Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar dapat berdampak baik sebagai bentuk KPU Kota Palembang untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilihan dan kemajuan kualitas demokrasi untuk negara Indonesia Penulis menemukan bahwa permasalahan partisipasi masyarakat di kota Palembang masih rendah dan masih memerlukan cara khusus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kota Palembang tersebut untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Palembang berupa formulasi dan sasaran jangka panjang, proses pemilihan tindakan, dan pemanfaatan pengalokasian sumberdaya berbagai program yang diupayakan dan pelaksanaan perencanaan agar masyarakat sadar akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi hal ini di lakukan dalam bentuk bekerjasama antar lembaga pemerintahan dan instansi pendidikan.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan yang dilakukan Ketua KPU Kota Palembang peneliti rasa sudah berjalan sesuai program yang di susun oleh KPU Pusat dan Provinsi sehingga KPU Kota Palembang sudah banyak melakukan kerjasama antar instansi pemerintahan daerah dan pendidikan adapun yang dilakukan oleh

Ketua KPU Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Palembang berupa formulasi dan sasaran jangka panjang, proses pemilihan tindakan, dan pemanfaatan pengalokasian sumberdaya. KPU Kota Palembang dalam memenuhi targetnya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Palembang tentunya memiliki hambatan yaitu sebuah ancaman yang berasal dari luar dan harus di indentifikasi. dalam mengidentifikasi ancaman tersebut KPU Kota Palembang dapat menyusun sebuah cara dimana kegiatan tersebut dapat mengendalikan ancaman tersebut.

Dalam peningkatan partisipasi masyarakat KPU Kota Palembang mengupayakan berbagai program dan pelaksanaan perencanaan agar masyarakat sadar akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi hal ini di lakukan dalam bentuk bekerjasama antar lembaga pemerintahan dan instansi pendidikan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kinerja aparatur sipil negara dalam peerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di BKPSDM Kabupaten Bandung Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama
Sarwono, S. W. (2015). Teori- Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers. Samuel P. Huntington & Joan Nelson. (1994) Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: PT Rineka Cipta.

B. Jurnal

- Hardianto, Wily Tri ,Dkk (2022) Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Dalam MeningkatkanPartisipasi Politik Masyarakat. Malang
Sari, Winda, Dkk (2019) Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. Palembang

C. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 08 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur, Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Dan Atau Walikota, Dan Wakil Walikota

D. Sumber Lainnya

- Website KPU Kota Palembang dan KPU Provinsi Sumatera Selatan. Diakses pada tanggal 10 November 2022 <https://kotapalembang.kpu.go.id/>

